

## ABSTRAK

**Irwan Saputra: Nim 2011/1101603. Implementasi Kebijakan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG di Nagari Malai V Suku, Kabupaten Padang Pariaman**

Program konversi minyak tanah ke LPG merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi pemakaian minyak tanah dengan dialihkan ke LPG dengan membagikan kompor, tabung beserta peralatannya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan yang terjadi dalam implementasi program, seperti adanya kerusakan pada paket yang dibagikan, adanya pungutan biaya yang dibebankan kemasayarakat, kurangnya sosialisasi dan edukasi yang diberikan kemasayarakat. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Implementasi Kebijakan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG di Nagari Malai V Suku Kabupaten Padang Pariaman 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG di Nagari Malai V Suku Kabupaten Padang Pariaman. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi program konversi ke LPG.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Jenis data adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis melalui reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di Nagari Malai V Suku Kabupaten Padang Pariaman belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari banyak indikator-indikator implementasi kebijakan yang belum tercapai dengan baik, seperti indikator kinerja kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar badan pelaksana dan indikator lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Serta banyaknya kendala-kendala yang ditemui dalam implementasi program konversi minyak tanah ke LPG ini seperti fasilitas yang tidak memadai dalam pelaksanaan program dan kurangnya sosialisasi dan edukasi yang diberikan kemasayarakat.